

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada penelitian kali ini menjelaskan mengenai Amerika Serikat sebagai negara hegemoni atau negara adidaya yang dapat mempengaruhi negara mitra untuk mem-*blacklist* Huawei. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan Amerika Serikat agar negara lain juga turut mem-*blacklist* Huawei karena hal tersebut dapat berdampak pada keamanan nasionalnya apabila negara tersebut memutuskan untuk tetap berbisnis dengan Huawei.

Huawei merupakan perusahaan yang bergerak sebagai penyedia sarana teknologi informasi dan komunikasi atau disebut juga ICT (*Information and Communication Technology*) serta perangkat pintar global terkemuka di dunia.¹ Huawei telah didirikan selama kurang lebih 36 tahun tepatnya pada tahun 1987 di Shenzhen bagian China Selatan oleh pendirinya bernama Ren Zhengfei yang pernah menjabat sebagai perwira militer sebelum membangun perusahaan. Ia adalah anggota tentara China yaitu tentara pembebasan rakyat hingga dibubarkan oleh pemerintah China pada tahun 1983.²

¹ Huawei, “*Tentang Huawei*”, diakses dalam <https://consumer.huawei.com/id/about-us/>, (9/10/2021, 21:22 WIB)

² Norman Pearlstine, David Pierson, Robyn Dixon, David S. Cloud, Alice Su, Max Hao Lu, “*The man behind Huawei*”, diakses dalam <https://www.latimes.com/projects/la-fi-tn-huawei-5g-trade-war/> (9/10/2021, 21:50 WIB)

Pada awalnya terjadi penangkapan Meng Wanzhou pada tanggal 1 Desember 2018. Meng Wanzhou sendiri merupakan anak dari pendiri Huawei dan menjabat sebagai kepala keuangan Huawei. Ia ditangkap paksa oleh pemerintah Amerika Serikat karena telah melakukan transaksi penjualan teknologi Huawei kepada Iran dan hal tersebut melanggar kerja sama Huawei dengan China melalui arahan Donald Trump. Selain itu, Meng Wanzhou telah melakukan penipuan bank Amerika Serikat mengenai transaksi bisnis dengan Iran.³ Kemudian Amerika Serikat memberi tuduhan kepada Huawei atas keamanan nasional (*National Securities*) karena Donald Trump menganggap teknologi Huawei digunakan sebagai perangkat mata-mata China untuk menyabotase Amerika Serikat melalui teknologi internet 5G yang kemudian Huawei dilarang untuk mengembangkan bisnis internet 5G di wilayah Amerika Serikat dan negara-negara lainnya.⁴ Meng Wanzhou ditahan oleh pemerintah Amerika Serikat selama 3 tahun lamanya sejak tahun 2018 dan dibebaskan pada tahun 25 September 2021. Pembebasan tersebut dilakukan dengan berbagai syarat yang telah dinegosiasikan antara diplomat China dengan Amerika Serikat. Syaratnya yaitu dengan membuktikan bahwa tuduhan yang dijatuhkan kepadanya adalah benar maupun salah. Salah satunya tuduhan atas pernyataan palsu untuk Bank HSBC (*HSBC Holdings PLC*) ternyata benar adanya karena Meng Wanzhou telah mengelabui pihak Bank HSBC untuk bekerja sama

³ Herlina Kartika Dewi, "CFO Huawei capai kesepakatan dengan AS atas tuduhan penipuan, akan kembali ke China", diakses dalam <https://internasional.kontan.co.id/news/cfo-huawei-capai-kesepakatan-dengan-as-atas-tuduhan-penipuan-akan-kembali-ke-china>, (9/10/2021, 23:19 WIB)

⁴ CNBC Indonesia, 22 Mei 2019, "Trump Bombardir Bisnis Huawei", diakses dalam <https://www.youtube.com/watch?v=8reOI-6A0Xk>, (9/10/2021, 23:44 WIB)

dengan perusahaan Skycom dalam menjual peralatan elektronik ke negara Iran di mana hal tersebut telah melanggar kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran.⁵

Setelah adanya hal tersebut, akhirnya membuat Donald Trump kemudian memberi sanksi dengan memasukkan Huawei ke dalam daftar entitas (*entity list*) atau daftar hitam (*blacklist*) kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Huawei. Hal tersebut disampaikan melalui *United States Department of Commerce* atau Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang tertulis dalam Biro Industri dan Keamanan Amerika Serikat (*The Bureau of Industry and Security*) sehingga membuat Huawei dilarang bekerja sama tanpa adanya izin langsung dari pemerintah. Sanksi yang diberikan Donald Trump bukan hanya sekedar tuduhan kepada Meng Wanzhou dan perangkat Huawei, tetapi karena adanya pelanggaran dan kesalahan Huawei sendiri ditambah adanya penemuan celah keamanan pada produknya.⁶ Dengan begitu membuat Huawei mengalami kendala pada produksi dan pemasaran produknya terutama di negara-negara Amerika Serikat. Kejadian serupa juga pernah dialami oleh perusahaan teknologi China yaitu ZTE yang juga masuk ke dalam daftar hitam Amerika Serikat di tahun 2017 namun sudah menemukan jalan terang yaitu dengan membayar denda kepada Amerika Serikat.⁷

⁵ BBC News, “*Bos Huawei Meng Wanzhou yang dibebaskan Kanada tiba di China, 'Akhirnya saya pulang!*’”, diakses dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58690245>, (11/04/2022), 21:54 WIB)

⁶ CNBC Indonesia, *Op. Cit.*

⁷ Tim Merdeka, “*AS Larang Huawei, Buntut Perang Dagang atau Persaingan Bisnis*”, diakses dalam <https://www.merdeka.com/teknologi/as-larang-huawei-buntut-perang-dagang-atau-persaingan-bisnis.html>, (10/10/2021), 00:12 WIB)

Tidak heran mengapa Donald Trump curiga kepada Huawei terkait pencurian data, karena latar belakang pendiri Huawei yang merupakan perwira militer China yang kemungkinan dapat mengancam keamanan negara. Disisi lain, Washington (negara bagian Amerika Serikat) melarang perusahaan Amerika Serikat yang terikat kerja sama dengannya untuk melanjutkan bisnis dengan Huawei seperti menyuplai *chip* yang dibutuhkan Huawei untuk merakit *smartphone*. Sekutu Amerika Serikat seperti Selandia Baru dan Australia setuju dengan pelarangan kerja sama Huawei. Menurut Inggris, apabila terus menggunakan produk Huawei akan mempengaruhi diplomasi penting antara Inggris dengan Amerika Serikat dan berisiko akan membahayakan kerja sama di masa yang akan datang. Apabila Inggris memutuskan untuk melarang teknologi 5G Huawei beredar dinegaranya maka akan berisiko untuk terjadi serangan dunia maya. Banyak negara seperti Amerika Serikat yang mendukung untuk memakai produk dalam negerinya seperti Juniper Networks.inc maupun produsen *chip* Qualcomm.inc. Di Eropa juga serupa seperti menggunakan produknya sendiri yaitu Ericsson asal Swedia dan juga Nokia dari Finlandia. Bahkan Nokia sanggup untuk memasok teknologi 5G yang banyak apabila Huawei benar-benar dilarang beredar di Eropa.⁸

Terdapat Undang-Undang Intelijen Nasional China tahun 2017 yang menjelaskan “Sebuah organisasi atau perusahaan harus bersikap mendukung, serta kolaboratif dalam kerja intelijen nasional.” Itu berarti pemerintah Beijing dapat

⁸ Teguh Suyudi, “*Apa itu Huawei dan Mengapa Dilarang?*”, diakses dalam <https://www.itworks.id/30680/apa-itu-huawei-dan-mengapa-dilarang.html>, (11/10/2021, 07:13 WIB)

memaksa perusahaan Huawei sebagai kaki tangannya untuk melaksanakan permintaannya. Tetapi pihak Huawei telah membantah bahwa hal tersebut tidaklah benar karena kegiatan tersebut dapat membahayakan negaranya sendiri atau negara lain, organisasi, maupun individu terutama ketika bersangkutan dengan keamanan siber serta perlindungan penggunanya. Amerika Serikat memberi sanksi kepada Huawei atas dasar melindungi keamanan nasionalnya dari pengaruh asing terutama dengan adanya campur tangan pemerintah. Ditambah dengan adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak Huawei.⁹ Menurut Kepala keamanan siber Huawei John Suffolk, meskipun ada undang-undang China yang memerlukan adanya kolaborasi dengan negara tetapi perusahaan tidak wajib melakukannya. Pihak Huawei telah melihat semua undang-undang yang ada dan telah divalidasi langsung oleh firma hukum asal London yaitu *Clifford Chance*.

Melalui latar belakang tersebut, kemudian dapat dianalisis upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam mempengaruhi negara mitra untuk mem-*blacklist* Huawei. Kemudian akan dijelaskan negara mana saja yang terdampak dari pengaruh Amerika Serikat. Penelitian ini juga memiliki urgensi mengenai bagaimana sebuah negara seperti Amerika Serikat dapat memberikan sanksi kepada sebuah perusahaan multinasional serta memberikan tekanan terhadap negara lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam mempengaruhi negara mitra melalui sanksi terhadap Huawei?

⁹ *Ibid.*

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian kali ini yaitu agar mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam mempengaruhi negara mitra melalui sanksi terhadap Huawei.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat kepada semua orang dalam menambah wacana dan pengetahuan mengenai bentuk upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam mempengaruhi negara mitra melalui sanksinya terhadap Huawei. Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberi pandangan umum mengenai alasan Amerika Serikat berupaya mempengaruhi negara mitra untuk tidak berbisnis dengan Huawei lagi.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap agar dapat menambah wawasan bagi pembaca dan bagi siapapun. Penelitian ini dapat dibaca oleh semua kalangan baik itu mahasiswa atau umum. Dengan adanya penelitian ini diharap dapat menjadi tafsiran dan dapat dilanjutkan ke dalam bentuk penelitian lainnya.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak akan sempurna jika tidak didampingi dengan penelitian yang ada sebelumnya. Dalam membantu penulis membahas penelitian dengan baik, maka penulis menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu. Tujuan dari digunakannya penelitian terdahulu yaitu untuk membantu penulis dalam

menganalisis lebih lanjut. Penelitian terdahulu juga bertujuan untuk membedakan fokus yang sedang diteliti.

Penelitian pertama, skripsi berjudul **Sanksi Ekonomi Amerika Serikat terhadap perusahaan ZTE sebagai Bagian dari Ketegangan Politik dalam Rivalitas antara Amerika Serikat dengan Iran tahun 2010-2017** yang ditulis oleh Florence dari Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.¹⁰ Skripsi tersebut melibatkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi pada perusahaan teknologi China ZTE karena melanggar sanksi ekonomi terhadap Iran.

Florence menjelaskan melalui perspektif realisme yang memandang hegemoni sebagai yang paling berkuasa dalam lingkup ekonomi politik dunia (*hegemonic stability theory*). Dalam hal ini, kekuatan hegemoni disahkan dengan melibatkan negara lain untuk menjaga tatanan internasional antara aktor di tingkat internasional. Kasus yang terjadi pada tahun 2017 membuat perusahaan teknologi telekomunikasi ZTE membayar denda kepada Amerika Serikat sebanyak \$900 juta dollar. ZTE mengaku bersalah atas tindakannya dalam menghindari embargo ke Iran. ZTE secara ilegal menggunakan barang milik Amerika Serikat untuk digunakan pada perangkatnya yang selanjutnya didistribusikan ke negara Iran.

Penelitian kedua adalah skripsi berjudul **Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Kasus Pemblokiran Produk Huawei Technologies Co. Ltd.**

¹⁰ Florence, “*Sanksi Ekonomi Amerika Serikat terhadap perusahaan ZTE sebagai Bagian dari Ketegangan Politik dalam Rivalitas antara Amerika Serikat dengan Iran tahun 2010-2017*”, Skripsi, Bandung: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, diakses dalam: <http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/9835/Cover%20-%20Bab1%20-%203315058sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (09/10/2021; 20:24 WIB)

Pada Pembangunan Jaringan di Amerika Serikat yang ditulis oleh Awaluddin Nur Al Shammy Putra dari Universitas Hang Tuah.¹¹ Isi dari penelitian tersebut yaitu membahas mengenai peran WTO dalam menangani kasus pemblokiran produk Huawei di Amerika Serikat.

Terkait kasus yang terjadi antara 2 negara besar Amerika Serikat dengan China membuktikan bahwa GATT atau organisasi ekonomi mengenai persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan tidak dapat menangani permasalahan yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan aktor lain seperti *World Trade Organization* (WTO) sebagai Organisasi Perdagangan Dunia dalam membantu menyelesaikan masalah. WTO memiliki peran sebagai inisiator yang dalam hal ini berupaya menjembatani antara Amerika Serikat dengan China. Selain itu, WTO juga menjadi fasilitator dan mediator. Dampak dari adanya perang dagang yang terjadi yaitu menimbulkan harga barang menjadi mahal terutama di negara-negara berkembang.

Penelitian ketiga adalah skripsi dari **Yasin Yayang Malendra Sibarani** yang berjudul **Alasan Di Balik Kebijakan Restriktif Pemerintah Amerika Serikat Terhadap Operasi Bisnis Huawei**.¹² Isi penelitian tersebut membahas mengenai kebijakan restriktif Donald Trump yang berdampak pada perusahaan teknologi multinasional Huawei. Adanya perusahaan multinasional di Amerika Serikat tidak dapat terlepas dari campur tangan pemerintah *home country*.

¹¹ Awaluddin Nur Shammy Putra, "*Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Kasus Pemblokiran Produk Huawei Technologies Co. Ltd. Pada Pembangunan Jaringan di Amerika Serikat*", Skripsi, Surabaya: Program Studi Hukum, Universitas Hang Tuah, diakses dalam: https://repository.hangtuah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2689 (27/12/21; 22:10 WIB)

¹² Yasin Yayang Malendra Sibarani, "*ALASAN DI BALIK KEBIJAKAN RESTRIKTIF PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT TERHADAP OPERASI BISNIS HUAWEI*", Surabaya: Program Studi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, diakses dalam <https://repository.unair.ac.id/100762/4/4.BAB%20I.pdf> (10/10/2021, 20:00 WIB)

Negara dapat melarang adanya operasi bisnis perusahaan multinasional apabila merasa ada dorongan politik di belakangnya serta ada persaingan antara *home country* dengan *host country*. Banyak perusahaan asing yang disokong oleh negara asalnya merugikan *host country*. Pada kasus Huawei di Amerika Serikat, Donald Trump menyatakan jika Huawei telah bekerja sama dengan ekosistem nasional China di mana Huawei telah diberi batasan, dipengaruhi, serta diarahkan oleh pemerintah China. Hal tersebut membuat terjadinya pembatasan lapangan produksi bagi bisnis Huawei sebagai strategi Amerika Serikat dalam mengurangi dominasi Huawei di negaranya. China dalam kurun waktu terakhir menjadi negara yang bangkit dengan perkembangan teknologi mereka dan secara tidak langsung mengancam dominasi Amerika Serikat.

Penelitian keempat yaitu berupa jurnal berjudul *The Case for Regulating Huawei* yang ditulis oleh **Ilan Alon, Wenxian Zhang, dan Christoph Lattemann**.¹³ Jurnal tersebut merupakan jurnal bisnis internasional yang dipublikasikan tahun 2021. Membahas mengenai regulasi Huawei dan permasalahan yang dihadapi Huawei.

Huawei merupakan juara global dalam industri telekomunikasi sehingga menjadikannya perusahaan multinasional terbesar di dunia yang berasal dari China serta menjadi kesayangan Republik Partai Komunis Tiongkok (PKT). Keunggulan Huawei di bidang teknologi yang dimilikinya membuat ketakutan tersendiri akan spionase dan kekhawatiran terkait keamanan siber. Perjuangan Huawei dan China

¹³ Ilan Alon, Wenxian Zhang, Christoph Lattemann, "The Case for Regulating Huawei", Journal International Business, Vol. 10, No. 3 (2021), Norway: University of Agder, hal 202-204, diakses dalam DOI: 10.1177/2319714520984666 (27/12/21; 23:33 WIB)

dalam melawan Amerika Serikat sangat dipengaruhi sifat ekonomi politik lingkungan domestik kapitalisme negara. Kehadiran Huawei menjadi perusahaan global yang mendapat dukungan dari negara-negara *Global South* membuat China berupaya memperluas kontrol negara tersebut atas infrastruktur jaringan transnasional dan merekonstruksi tatanan ekonomi politik multipolar di era ekonomi digital.

Penelitian kelima adalah jurnal berjudul **Australia, Huawei and 5G** oleh **Benjamin Rhode** tahun 2019.¹⁴ Jurnal tersebut menjelaskan mengenai masuknya Australia di tahun 2018 menjadi negara bagian pertama dalam aliansi intelijen *Five Eyes* yang kemudian membuat panduan keamanan kepada operator telekomunikasinya, mewajibkan mereka untuk menghindari pembelian peralatan atau layanan 5G dari perusahaan China (Huawei).

Australia berada di negara *Five Eyes* bersama dengan Australia, Kanada, Selandia Baru, Britania Raya, dan juga Amerika Serikat. Sikap Amerika Serikat terhadap Huawei sangat berdampak bagi negara *Five Eyes* lain. Tetapi, untuk saat ini London dan juga Ottawa masih lebih memilih menggunakan 5G Huawei terlepas dari negara asal pembuat. Mereka berpikir bahwa risiko dapat dikurangi dengan diversifikasi. Washington mungkin masih bimbang dalam menentang Huawei terutama dalam ikut campur masalah perang dagang Amerika Serikat dengan China. Selain itu, suara Amerika Serikat yang meyakinkan dapat membuat negara lain berpikir lebih lanjut. Namun Microsoft dan Google telah secara terbuka

¹⁴ Benjamin Rhode, "Australia, Huawei and 5G", *Journal Strategic Comments*, Vol. 25, Issue. 7 (2019), hal. 10-12, diakses dalam DOI: 10.1080/13567888.2019.1680159

mendukung tren kebijakan Amerika Serikat bahwa Huawei memiliki konsekuensi berbahaya yang lebih besar daripada manfaatnya. Mitra dagang utama dan sekutu keamanan Australia termasuk Indonesia, Singapura, dan Korea Selatan tidak memiliki penolakan yang kuat terhadap produk Huawei. Namun, bisa saja Australia mencabut kebijakannya tersebut.

Penelitian keenam berupa jurnal yang ditulis oleh **Xin Liu** berjudul **Chinese Multinational Enterprises Operating in Western Economies: Huawei in the US and the UK**.¹⁵ Huawei lahir di China, negara non-demokratis dan non-Barat yang saat ini menentang negara adidaya nomor 1 di dunia Amerika Serikat. Studi kasus tersebut bertujuan untuk mengembangkan model lama pemeriksaan *Multinational Enterprises* (MNEs) China yang berfokus pada faktor ekonomi dengan memasukkan lebih banyak variabel seperti hubungan bilateral, hukum, pengaruh media, dan pendekatan budaya di bawah struktur pemerintahan.

Keberhasilan *Multinational Enterprises* (MNEs) China dipengaruhi oleh faktor eksogen atau negara tuan rumah dan juga endogen atau negara asal. Analisis komparatif Huawei di Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan lingkungan bisnis yang berbeda secara keseluruhan di kedua negara. Menurut pendiri Huawei, Ren Zhengfei, Amerika Serikat adalah negara yang tertutup dan cenderung mempolitisir segalanya, sementara Inggris cenderung lebih terbuka dibandingkan Amerika Serikat. Studi kasus komparatif ini menggambarkan China sebagai negara dengan kekuatan yang sedang bangkit dan sebagai ideologis China ‘merah’ yang

¹⁵ Xin Liu, “*Chinese Multinational Enterprises Operating in Western Economies: Huawei in the US and the UK*”, *Journal of Contemporary China*, Vol. 30, Issue. 129 (2021), UK: University of Central Lancashire, hal. 1-18, diakses dalam DOI: 10.1080/10670564.2020.1827351

berarti mengarah pada permusuhan dan kewaspadaan. Sama seperti *Belt and Road Initiative* yang mewakili bidang geopolitik dan ajaran konfusius budaya, Huawei mewakili pandangan dibidang teknologi tetapi dipolitisasi.

Penelitian ketujuh jurnal berjudul **A Case Study on Huawei Technologies** yang ditulis oleh **Maria Del Mar Chacon** dan **Abhisek Rajawat**.¹⁶ Jurnal tersebut berisi tentang strategi bisnis serta kebijakan yang diambil Huawei dalam menjalankan bisnisnya dan memasarkan produknya secara global. Dijelaskan melalui data kuantitatif dan kualitatif.

Huawei telah menggunakan mode pasar global yang berbeda tergantung pada jarak geografis negara yang dituju, jenis pasar, dan jenis produk yang dipasarkan. Mereka selalu melihat kebutuhan pelanggan. Misalnya di Rusia yang memakai strategi *Joint Venture* di mana menysasar pasar dengan keadaan infrastruktur komunikasi lemah namun mempunyai potensi pengembangan yang menguntungkan. Sementara di negara-negara wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Selatan Huawei menggunakan metode ekspor karena memiliki faktor jarak geografis dan kondisi pasar lokal. Misalnya di Kolombia tidak semua produk Huawei dipasarkan di sana melainkan hanya produk *smartphone* dan tablet saja. Layanan penjualan Huawei tersebar di hampir 140 negara di dunia dan melayani 5 operator industri telekomunikasi terbesar di pasar global. Sebagian besar kesuksesan Huawei dipengaruhi oleh strategi pasar yang tepat dan efisien melalui keputusan, kebijakan dan praktik yang dijalankan. Dalam bersaing dengan

¹⁶ Maria Del Mar Chacon, Abhisek Rajawat, "A Case Study on Huawei Technologies", Journal of The Community Development in Asia, Vol. 2, No. 3 (2019), Malang: AIBPM Publisher, hal. 29-36, diakses dalam DOI: 10.32535

perusahaan lain, Huawei juga bekerja sama dengan perusahaan kamera Leica untuk meningkatkan kualitas kameranya agar tidak kalah saing dengan merek *smartphone* lainnya seperti Apple dan juga Samsung.

Penelitian kedelapan yaitu jurnal berjudul **Keterkaitan Huawei dan Tiongkok: Instrumen, Subjek, atau Agen?** yang ditulis oleh **Ergy Ghulam Habibie**.¹⁷ Huawei adalah subjek dari kepentingan nasional Tiongkok sehingga memunculkan pertanyaan publik mengenai hubungan antara perusahaan dengan negara. Huawei sebagai perusahaan swasta yang berdiri sendiri dinilai aktif dalam menjalin hubungan dengan pemerintahan. Sebaliknya, pemerintah Tiongkok juga memberi dukungan melalui kebijakan yang telah dibuat. Dalam mengaitkan hubungan antara negara dengan pasar global menggunakan teori merkantilisme.

Huawei bukanlah instrumen ataupun agen melainkan subjek pemerintah Tiongkok. Oleh sebab itu, dihasilkan 4 indikasi. Yang pertama, Huawei adalah sebuah perusahaan multinasional swasta yang tidak seharusnya di *back up* oleh pemerintah Huawei. Kedua, keaktifan Huawei dalam berperan dalam pemerintah Tiongkok didasari oleh sukarela Huawei dengan tujuan meningkatkan produksi serta keuntungan bisnis. Indikasi yang ketiga, Huawei bukanlah perusahaan milik negara yang harus tunduk pada peraturan pemerintah (arahan dari pemerintah langsung). Yang keempat, kunci keberhasilan sebuah perusahaan berada pada perusahaan tersebut dan bukanlah ditangan pemerintah.

¹⁷ Ergy Ghulam Habibie, “Keterkaitan Huawei dan Tiongkok: Instrumen, Subjek, atau Agen?”, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 3, No.3, (2014), Surabaya: Universitas Airlangga, hal. 1081-1102, diakses dalam <http://journal.unair.ac.id/JAHI@keterkaitan-huawei-dan-tiongkok--instrumen,-subjek,-atau-agen--article-8259-media-131-category-8.html>

Penelitian kesembilan, merupakan jurnal berjudul **Huawei Versus the United States? The Geopolitics of Exterritorial Internet Infrastructure** yang ditulis oleh **Min Tang**.¹⁸ Membahas mengenai sifat geopolitik Huawei dalam konteks yang lebih luas dalam tata kelola internet global.

Dari era perfilman Hollywood hingga era digital seperti sekarang, Amerika Serikat secara konsisten menggunakan sarana diplomatik politik, ekonomi, komersial dan budaya dalam mendominasi bisnis global dan mengatur struktur komunikasi internasional. Dengan upaya membatasi pengembangan Huawei melalui sanksi perdagangan membuat potensi China dalam mengendalikan infrastruktur teknologi 5G terhambat. Fakta bahwa pemerintah Amerika Serikat telah melakukan upaya besar untuk mempertahankan hegemoni dalam geopolitik informasi, menggunakan otoritas luar teritorial, dan mendorong aktor asing untuk mengambil tindakan hukum terhadap individu dan bisnis merupakan bentuk imperialisme. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara pada akhirnya yang mengendalikan aktor lain.

Penelitian kesepuluh yaitu jurnal dari **Md Sajjad Hosain** berjudul **Huawei ban in the US: Projected Consequences for international trade**.¹⁹

Pelarangan Huawei di Amerika Serikat tidak akan membawa dampak

¹⁸ Min Tang, "Huawei Versus the United States? The Geopolitics of Exterritorial Internet Infrastructure", International Journal of Communication, Vol 14 (2020), Bothell: University of Washington Bothell, hal. 4556-4577, diakses dalam <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/12624/3204>

¹⁹ Md Sajjad Hosain, "Huawei ban in the US: Projected Consequences for international trade", International Journal of Commerce and Economics, Vol. 1, Issue. 2 (2019), Chengdu: Sichuan University, hal. 22-25, diakses dalam www.commercejournal.in

menguntungkan bagi kedua belah pihak maupun konsumen *smartphone* meskipun dibutuhkan waktu untuk melihat dampak yang nyata.

Setelah adanya pelarangan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, Huawei segera menanggapi. Sejatinya bentrokan yang terjadi antara Amerika Serikat dengan China tidak dapat dihindari. Menurut Ren Zhengfei, hukuman 90 hari yang didapat Huawei tidak berarti banyak karena perusahaan akan tetap menghadapi kemungkinan kehilangan akses ke perusahaan-perusahaan asal Amerika. Pada tahun 2019, Richard Yu selaku CEO divisi produk konsumen Huawei mengatakan bahwa Huawei telah membuat sistem operasi miliknya sendiri apabila kehilangan akses untuk menggunakan Android. Huawei juga telah menimbun *chip* asal Amerika yang cukup untuk memproduksi *smartphone* selama berbulan-bulan. Banyak negara juga mengkhawatirkan produsen teknologi komunikasi dan pengawasan video asal China yang telah dilarang untuk digunakan di wilayah Amerika di bawah pengawasan undang-undang yang ada. Huawei telah memiliki rencana cadangan selain membuat sistem operasi miliknya sendiri apabila larangan Amerika Serikat terus berlanjut.

Dari keseluruhan penelitian terdahulu yang dimuat dalam penelitian penulis ini, dapat disimpulkan bahwa Huawei mengalami kendala yang cukup merugikan perusahaannya seperti yang dijelaskan pada skripsi Yasin Yayang Malendra Sibarani²⁰ di mana menjelaskan mengenai larangan operasi bisnis di Amerika Serikat terutama bagi perusahaan yang mendapat dorongan dari sebuah negara dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, penelitian serupa mengenai permasalahan

²⁰ Yasin Yayang Malendra Sibarani, *Op. Cit*, hal. 1

Huawei juga dibahas pada jurnal milik Ilan Alon, Wenxian Zhang, dan Christoph Lattemann²¹ dan juga jurnal milik Md Sajjad Hosain²² tentang pelarangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat tidak akan membawa dampak menguntungkan bagi kedua belah pihak melainkan hanya akan membuat kerugian. Kemudian didapat hasil penelitian mengenai peran organisasi internasional WTO yang menjadi penengah bagi Amerika Serikat dan Huawei terkait kasus pelarangan yang terjadi seperti pada penelitian milik Awaluddin Nur Shammy Putra.²³ Pembahasan mengenai strategi yang dilakukan Huawei dalam berbisnis dibahas pada jurnal berjudul ‘Australia, Huawei, and 5G’²⁴ tetapi hanya sebatas permasalahan teknologi internet 5G dan lingkup Australia saja. Penting dalam melihat Huawei bertahan menghadapi sanksi yang ada karena seperti pada penjelasan jurnal ‘A Case Study on Huawei Technologies’,²⁵ Huawei menjadi perusahaan multinasional ICT terbesar di pangsa global yang menempati peringkat 2 penjualan *smartphone* di tahun 2019 serta melayani 5 operator industri telekomunikasi terbesar di pasar global sehingga menjadikannya sebagai perusahaan industri yang memberikan inovasi teknologi dan melahirkan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Pada penelitian penulis sendiri akan membahas mengenai strategi Huawei selama diberi sanksi oleh Amerika Serikat dalam lingkup global dan dampak yang dirasakan Huawei sendiri maupun konsumen yang menggunakan produk Huawei ke depannya.

²¹ Ilan Alon, Wenxian Zhang, Christoph Lattemann, *Op. Cit*, hal. 202-204

²² Md Sajjad Hosain, *Op. Cit*, hal. 24

²³ Awaluddin Nur Shammy Putra, *Op. Cit*, hal. 58

²⁴ Benjamin Rhode, *Op. Cit*.

²⁵ Maria Del Mar Chacon, Abhisek Rajawat, *Op. Cit*, hal. 32

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1.	<p>Florence</p> <p><i>Sanksi Ekonomi Amerika Serikat terhadap perusahaan ZTE sebagai Bagian dari Ketegangan Politik dalam Rivalitas antara Amerika Serikat dengan Iran tahun 2010-2017</i></p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif</p> <p>Alat Analisa: <i>Hegemonic Stability Theory</i>, kebijakan luar negeri</p>	<p>Florence menjelaskan melalui perspektif realisme yang memandang hegemoni sebagai yang paling berkuasa dalam lingkup ekonomi politik dunia (hegemonic stability theory). Dalam hal ini, kekuatan hegemoni disahkan dengan melibatkan negara lain untuk menjaga tatanan internasional antara aktor di tingkat internasional. Kasus yang terjadi pada tahun 2017 membuat perusahaan teknologi telekomunikasi ZTE membayar denda kepada Amerika Serikat sebanyak \$900 juta dollar. ZTE mengaku bersalah atas tindakannya dalam menghindari embargo ke Iran. ZTE secara ilegal menggunakan barang milik Amerika Serikat untuk digunakan pada perangkatnya yang selanjutnya didistribusikan ke negara Iran.</p>
2.	<p>Awaluddin Nur Al Shammy Putra</p> <p><i>Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Kasus Pemblokiran Produk Huawei Technologies Co. Ltd. Pada Pembangunan Jaringan di Amerika Serikat</i></p>	<p>Jenis Penelitian: Yuridis Normatif</p> <p>Alat Analisa: Hukum Perdagangan Internasional, Perjanjian Internasional, Perang Dagang</p>	<p>Terkait kasus yang terjadi antara 2 negara besar Amerika Serikat dengan China membuktikan bahwa GATT atau organisasi ekonomi mengenai persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan tidak dapat menangani permasalahan yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan aktor lain seperti World Trade Organization (WTO) sebagai Organisasi Perdagangan Dunia dalam membantu menyelesaikan masalah. WTO memiliki peran sebagai</p>

			<p>inisiator yang dalam hal ini berupaya menjembatani antara Amerika Serikat dengan China. Selain itu, WTO juga menjadi fasilitator dan mediator. Dampak dari adanya perang dagang yang terjadi yaitu menimbulkan harga barang menjadi mahal terutama di negara-negara berkembang.</p>
3.	<p>Yasin Yayang Malendra Sibarani</p> <p><i>Alasan Di Balik Kebijakan Restriktif Pemerintah Amerika Serikat Terhadap Operasi Bisnis Huawei</i></p>	<p>Jenis Penelitian: Eksplanatif</p> <p>Alat Analisa: Keamanan Nasional, Spionase Ekonomi, Kepentingan Nasional</p>	<p>Negara dapat melarang adanya operasi bisnis perusahaan multinasional apabila merasa ada dorongan politik di belakangnya serta ada persaingan antara <i>home country</i> dengan <i>host country</i>. Banyak perusahaan asing yang disokong oleh negara asalnya merugikan <i>host country</i>. Pada kasus Huawei di Amerika Serikat, Donald Trump menyatakan jika Huawei telah bekerja sama dengan ekosistem nasional China di mana Huawei telah diberi batasan, dipengaruhi, serta diarahkan oleh pemerintah China. Hal tersebut membuat terjadinya pembatasan lapangan produksi bagi bisnis Huawei sebagai strategi Amerika Serikat dalam mengurangi dominasi Huawei di negaranya. China dalam kurun waktu terakhir menjadi negara yang bangkit dengan perkembangan teknologi mereka dan secara tidak langsung mengancam dominasi Amerika Serikat.</p>
4.	<p>Ilan Alon, Wenxian Zhang, Christoph Lattemann</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Huawei merupakan juara global dalam industri telekomunikasi sehingga menjadikannya perusahaan</p>

	<i>The Case for Regulating Huawei</i>	Alat Analisa: Bisnis Internasional	multinasional terbesar di dunia yang berasal dari China serta menjadi kesayangan Republik Partai Komunis Tiongkok (PKT). Keunggulan Huawei di bidang teknologi yang dimilikinya membuat ketakutan tersendiri akan spionase dan kekhawatiran terkait keamanan siber. Perjuangan Huawei dan China dalam melawan Amerika Serikat sangat dipengaruhi sifat ekonomi politik lingkungan domestik kapitalisme negara. Kehadiran Huawei menjadi perusahaan global yang mendapat dukungan dari negara-negara <i>Global South</i> membuat China berupaya memperluas kontrol negara tersebut atas infrastruktur jaringan transnasional dan merekonstruksi tatanan ekonomi politik multipolar di era ekonomi digital.
5.	Benjamin Rhode <i>Australia, Huawei and 5G</i>	Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif Alat Analisa: Kepentingan Nasional	Australia berada di negara <i>Five Eyes</i> bersama dengan Australia, Kanada, Selandia Baru, Britania Raya, dan juga Amerika Serikat. Sikap Amerika Serikat terhadap Huawei sangat berdampak bagi negara <i>Five Eyes</i> lain. Tetapi, untuk saat ini London dan juga Ottawa masih lebih memilih menggunakan 5G Huawei terlepas dari negara asal pembuat. Mereka berpikir bahwa risiko dapat dikurangi dengan diversifikasi. Washington mungkin masih bimbang dalam menentang Huawei terutama dalam ikut

			<p>campur masalah perang dagang Amerika Serikat dengan China. Selain itu, suara Amerika Serikat yang meyakinkan dapat membuat negara lain berpikir lebih lanjut. Namun Microsoft dan Google telah secara terbuka mendukung tren kebijakan Amerika Serikat bahwa Huawei memiliki konsekuensi berbahaya yang lebih besar daripada manfaatnya. Mitra dagang utama dan sekutu keamanan Australia termasuk Indonesia, , dan Korea Selatan tidak memiliki penolakan yang kuat terhadap produk Huawei. Namun, bisa saja Australia mencabut kebijakannya tersebut.</p>
6.	<p>Xin Liu</p> <p><i>Chinese Multinational Enterprises Operating in Western Economies: Huawei in the US and the UK</i></p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif</p> <p>Alat Analisa: Bisnis Internasional, Ekonomi Politik Internasional</p>	<p>Keberhasilan <i>Multinational Enterprises</i> (MNEs) China dipengaruhi oleh faktor eksogen atau negara tuan rumah dan juga endogen atau negara asal. Analisis komparatif Huawei di Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan lingkungan bisnis yang berbeda secara keseluruhan di kedua negara. Menurut pendiri Huawei, Ren Zhengfei, Amerika Serikat adalah negara yang tertutup dan cenderung mem-politisir segalanya, sementara Inggris cenderung lebih terbuka dibandingkan Amerika Serikat. Studi kasus komparatif ini menggambarkan China sebagai negara dengan kekuatan yang sedang bangkit dan sebagai ideologis China ‘merah’ yang berarti</p>

			mengarah pada permusuhan dan kewaspadaan. Sama seperti <i>Belt and Road Initiative</i> yang mewakili bidang geo-politik dan ajaran konfusius budaya, Huawei mewakili pandangan dibidang teknologi tetapi dipolitisasi.
7.	<p>Maria Del Mar Chacon, Abhisek Rajawat</p> <p><i>A Case Study on Huawei Technologies</i></p>	<p>Jenis Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif</p> <p>Alat Analisa: Strategi Bisnis</p>	<p>Huawei telah menggunakan mode pasar global yang berbeda tergantung pada jarak geografis negara yang dituju, jenis pasar, dan jenis produk yang dipasarkan. Mereka selalu melihat kebutuhan pelanggan. Misalnya di Rusia yang memakai strategi Joint Venture di mana menysasar pasar dengan keadaan infrastruktur komunikasi lemah namun mempunyai potensi pengembangan yang menguntungkan. Sementara di negara-negara wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Selatan Huawei menggunakan metode ekspor karena memiliki faktor jarak geografis dan kondisi pasar lokal. Misalnya di Kolombia tidak semua produk Huawei dipasarkan di sana melainkan hanya produk <i>smartphone</i> dan tablet saja. Layanan penjualan Huawei tersebar di hampir 140 negara di dunia dan melayani 5 operator industri telekomunikasi terbesar di pasar global. Sebagian besar kesuksesan Huawei dipengaruhi oleh strategi pasar yang tepat dan efisien melalui keputusan, kebijakan dan praktik yang dijalankan. Dalam bersaing dengan perusahaan lain, Huawei juga</p>

			bekerja sama dengan perusahaan kamera Leica untuk meningkatkan kualitas kameranya agar tidak kalah saing dengan merek <i>smartphone</i> lainnya seperti Apple dan juga Samsung.
8.	Ergy Ghulam Habibie <i>Keterkaitan Huawei dan Tiongkok: Instrumen, Subjek, atau Agen?</i>	Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif Alat Analisa: Kepentingan nasional	Huawei bukanlah instrumen ataupun agen melainkan subjek pemerintah Tiongkok. Oleh sebab itu, dihasilkan 4 indikasi. Yang pertama, Huawei adalah sebuah perusahaan multinasional swasta yang tidak seharusnya di <i>back up</i> oleh pemerintah Huawei. Kedua, keaktifan Huawei dalam berperan dalam pemerintah Tiongkok didasari oleh sukarela Huawei dengan tujuan meningkatkan produksi serta keuntungan bisnis. Indikasi yang ketiga, Huawei bukanlah perusahaan milik negara yang harus tunduk pada peraturan pemerintah (arahan dari pemerintah langsung). Yang keempat, kunci keberhasilan sebuah perusahaan berada pada perusahaan tersebut dan bukanlah ditangan pemerintah.
9.	Min Tang <i>Huawei Versus the United States? The Geopolitics of Exterritorial Internet Infrastructure</i>	Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif Alat Analisa: Komunikasi Global, Geopolitik, dan Imperialisme Media	Dari era perfilman Hollywood hingga era digital seperti sekarang, Amerika Serikat secara konsisten menggunakan sarana diplomatik politik, ekonomi, komersial dan budaya dalam mendominasi bisnis global dan mengatur struktur komunikasi internasional. Dengan upaya membatasi pengembangan Huawei melalui sanksi perdagangan

			membuat potensi China dalam mengendalikan infrastruktur teknologi 5G terhambat. Fakta bahwa pemerintah Amerika Serikat telah melakukan upaya besar untuk mempertahankan hegemoni dalam geopolitik informasi, menggunakan otoritas luar teritorial, dan mendorong aktor asing untuk mengambil tindakan hukum terhadap individu dan bisnis merupakan bentuk imperialisme. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara pada akhirnya yang mengendalikan aktor lain.
10.	Md Sajjad Hosain <i>Huawei ban in the US: Projected Consequences for international trade</i>	Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif Alat Analisa: Perdagangan Internasional, Diplomasi	Setelah adanya pelarangan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, Huawei segera menanggapi. Sejatinya bentrokan yang terjadi antara Amerika Serikat dengan China tidak dapat dihindari. Menurut Ren Zhengfei, hukuman 90 hari yang didapat Huawei tidak berarti banyak karena perusahaan akan tetap menghadapi kemungkinan kehilangan akses ke perusahaan-perusahaan asal Amerika. Pada tahun 2019, Richard Yu selaku CEO divisi produk konsumen Huawei mengatakan bahwa Huawei telah membuat sistem operasi miliknya sendiri apabila kehilangan akses untuk menggunakan Android. Huawei juga telah menimbun chip asal Amerika yang cukup untuk memproduksi smartphone selama berbulan-bulan. Banyak negara juga mengkhawatirkan produsen

			teknologi komunikasi dan pengawasan video asal China yang telah dilarang untuk digunakan di wilayah Amerika di bawah pengawasan undang-undang yang ada. Huawei telah memiliki rencana cadangan selain membuat sistem operasi miliknya sendiri apabila larangan Amerika Serikat terus berlanjut.
11.	Ekky Rustanto <i>Upaya Amerika Serikat Mempengaruhi Negara Mitra Melalui Sanksi Terhadap Huawei</i>	Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif Alat Analisa: Realisme, Diplomasi Koersif	Huawei sebagai perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi mendapat sanksi dari Amerika Serikat sejak masa pemerintahan Donald Trump. Pada awalnya, Meng Wanzhou dituduh pemerintah Amerika Serikat telah menggunakan perangkat Huawei sebagai alat mata-mata serta menjual produknya ke Iran secara ilegal. Sehingga sanksi yang diberikan membuat Huawei mengalami kendala dalam berbisnis dan beberapa kerugian yang didapat. Amerika Serikat sebagai negara superpower dapat mempengaruhi negara mitra untuk tidak lagi berbisnis dan menggunakan perangkat milik Huawei lagi. Upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat yaitu seperti diplomasi, ancaman, maupun dalam bentuk kampanye.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Realisme

Realisme mulai menjadi perspektif yang dominan bagi negara-negara di dunia semenjak tahun 1940 hingga sekarang. Paradigma realis melihat negara bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara yang sama seperti teori ekonomi melihat agen individu bersaing dalam mendapatkan keuntungan. Salah satu sejarawan sekaligus pemikir realisme adalah Thucydides. Menurut Thucydides pada salah satu bukunya yang berjudul “*History of the Peloponnesian War*” membahas mengenai meningkatnya kekuasaan negara akibat dari perang dan adanya ketidakamanan bagi negara lain. Contohnya seperti yang terjadi pada perang Sparta dan Athena pada abad ke 5 sebelum masehi dimana adanya peningkatan kekuatan bagi Athena sehingga timbul rasa ketidakamanan bagi Sparta karena peningkatan kekuatan Athena tadi. Dapat disimpulkan jika penyebab adanya perang bukan karena agresivitas, melainkan adanya ketidakamanan yang dirasakan. Thucydides menekankan jika kemungkinan atau *might* lebih penting daripada *right* atau kebenaran.²⁶

Menurut salah satu pemikir realis yaitu Hans Joachim Morgenthau, politik internasional merupakan konsep kepentingan yang diartikan dalam ukuran kekuasaan sebuah negara.²⁷ Menurutnya, aktor utama dalam suatu hubungan Internasional adalah negara-bangsa dengan menekankan adanya *power* atau kekuasaan yang mendasarinya. Penting bagi sebuah negara dalam membuat suatu

²⁶ Vinsensio Dugis, 2016, “*Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*”, Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, hal.37-38 (Dugis, 2016)

²⁷ Edwin M. B. Tambunan, “*Realisme Politik Morgenthau: Suatu Tinjauan Singkat*”, Verity, Vol. 2, No.3 (Januari-Juni 2010), Jakarta Selatan: Universitas Pelita Harapan, hal. 20

kebijakan luar negeri yang didasarkan pada kepentingan nasional. Hans menulis pada bukunya yang berjudul “*Politics among Nations*” yang berisi mengenai realisme politik tertuang dalam hubungan kekuatan dan kepentingan (*power and interest*).²⁸

Asumsi dasar realisme yaitu negara-negara yang berdaulat adalah aktor utama dari adanya hubungan internasional. Aktor lain seperti organisasi dan individu juga salah satunya tetapi kekuatan dan kekuasaan mereka terbatas. Negara menjadi aktor kesatuan sekaligus aktor yang rasional dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada pemenuhan kepentingan nasional. Realisme memiliki pandangan yang pesimis mengenai sifat alamiah manusia yang menunjukkan jika hubungan internasional itu bersifat kompetitif dengan menunjukkan sisi yang lebih konflikual. Realisme berada pada konteks anarki yang berarti tidak ada otoritas tertinggi yang bertanggung jawab secara internasional atau memaksakan hukum dalam artian tidak ada negara di atas negara. Menurut Niccolò Machiavelli pada bukunya yang berjudul *The Prince* pada tahun 1532, perhatian seorang pemimpin negara didasarkan pada peningkatan keamanan nasional dengan cara mewaspadai hingga mengatasi adanya ancaman internal maupun eksternal terhadap pemerintahannya. Pemimpin atau penguasa negara harus berbuat baik ketika mereka bisa, tetapi juga menggunakan kekerasan apabila diperlukan dalam menjamin kelangsungan hidup yang bebas dari ancaman. Dalam hubungan

²⁸ IR thinkers, “*Hans Morgenthau dan Political Realism*”, Universitas BINUS, diakses dalam <https://ir.binus.ac.id/2012/07/27/hans-morgenthau-dan-political-realism/>, (07/10/2023, 20:53 WIB)

internasional, tidak ada kekuatan absolut karena berubah-ubah dan sifatnya dinamis.²⁹

Negara sebagai aktor utama dengan sifatnya yang rasional akan mengedepankan *cost and benefit* dalam menjalankan tindakannya demi kepentingan nasional. *Cost* merupakan hal yang harus dikeluarkan negara dalam mencapai tujuannya yang berupa biaya. Biaya tersebut misalnya biaya keperluan militer dan ekonomi, biaya material hingga non-material. Sedangkan *Benefit* yaitu segala sesuatu yang didapat oleh negara dari adanya sebuah tindakan. Misalnya keuntungan ekonomi, keuntungan material, peningkatan keamanan, hingga peningkatan pengaruh (*prestise*).

Amerika Serikat menggunakan realisme pada kebijakan luar negerinya dan berfokus pada kepentingan nasional sebagai faktor utama dalam menentukan perilaku negara. Kepentingan nasional berkaitan dengan hasrat negara dalam memajukan ekonominya, militer, dan budaya. Kepentingan nasional menurut Hans Joachim Morgenthau yakni merupakan upaya suatu negara dalam mencari kekuatan dan kekuasaan yang digunakan untuk mengatur sebuah negara dengan negara lainnya seperti memelihara dan mengembangkan suatu kontrol tertentu. Menurutnya, konsep tersebut serta kekuasaan negara dijadikan faktor kunci untuk membangun landasan politik dalam dan luar negeri.³⁰

Beberapa contoh dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan dasar realisme, yaitu :

²⁹ Sandrina Antunes, 2018, Isabel Camisã, “*Introducing Realism in International Relations Theory*”, E-International Relations, Belgium, hal. 1

³⁰ Arry Bainus, Junita Budi Rachman, “*Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Internasional*, *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 2, No. 2 (2018), hal. 109

- a) Kebijakan intervensi militer di Irak : Tujuannya yaitu untuk menjatuhkan rezim milik Saddam Hussein serta untuk memberantas senjata pemusnah massal milik pemerintah Irak. Terdapat pula senjata nuklir maupun senjata kimia yang juga dianggap Amerika Serikat sebagai ancaman keamanan.³¹
- b) Kebijakan dalam berdamai dengan Taliban di Afghanistan : Berdasarkan pada prinsip *America First* pada masa pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat dengan kebijakan luar negerinya yaitu berdamai dengan pemerintahan Taliban dengan menarik pasukan militernya demi mementingkan keamanan nasionalnya.³²
- c) Kebijakan containment atau pembendungan terhadap Uni Soviet selama terjadi Perang Dingin : Digunakan Amerika Serikat agar membendung pengaruh dan penyebaran komunisme di negara lain serta membatasi perluasan Uni Soviet selama Perang Dingin agar tidak menjadi kekuatan dominan di dunia.³³
- d) Kebijakan embargo di Iran : Kebijakan luar negeri yang dibentuk oleh Amerika Serikat dengan tujuan menekan pemerintahan Iran untuk tidak lagi mengembangkan program nuklirnya, kemampuan militer, hingga

³¹ Yuniarti, Anik, Dra. Siti Muti'ah Setiawati, "*Politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Irak sejak Perang teluk I*", Tesis, Yogyakarta: S2 Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

³² Safna Putri Purba, Reni Windiani, Satwika Paramasatya, "*Kebijakan Amerika Serikat Menyetujui Perjanjian Perdamaian dengan Taliban dan Penarikan Pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan di Masa Kepemimpinan Donald Trump*", *Journal of International Relations*, Vol. 8, No. 3 (2022), Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 354

³³ Melvyn P. Leffler, "*Containment*", Princeton University, diakses dalam http://assets.press.princeton.edu/chapters/pons/s2_9143.pdf, (07/10/2023, 22:03 WIB)

kemitraannya dengan Rusia dan China karena hal tersebut dinilai sebagai ancaman bagi Amerika Serikat dan kepentingannya.³⁴

- e) Kebijakan dalam mem-*blacklist* Huawei : Kebijakan yang dibuat Amerika Serikat dalam membatasi pengaruh Huawei dalam bisnis internasional dan membendung dari adanya spionase yang dilakukan oleh perusahaan teknologi multinasional.³⁵

Teori realisme disini digunakan untuk menjabarkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebagai negara hegemoni yang dapat mempengaruhi negara lainnya dengan kepentingan nasionalnya. Amerika Serikat mempengaruhi negara mitra untuk tidak menggunakan perangkat Huawei terutama pada infrastruktur 5G-nya karena adanya risiko keamanan seperti spionase yang terdapat pada produknya, dengan begitu kemungkinan akan mengakibatkan hubungan diplomasi dengan negara lainnya menjadi tidak aman.

1.5.2 Diplomasi Koersif

Adanya politik luar negeri yang berbeda di setiap negara merupakan hal yang wajar karena merupakan motivasi dalam mencapai kepentingan nasionalnya.³⁶ Suatu negara dapat memaksa negara lain dengan mengancam menggunakan kekuatan yang ada misalnya pengusiran dari organisasi internasional, sanksi ekonomi seperti embargo, dan lain sebagainya. Diplomasi koersif adalah ancaman atau tindakan paksa yang dilakukan sebuah negara untuk mempengaruhi perilaku

³⁴ Clayton Thomas, "Iran: Background and U.S. Policy", Congressional Research Service, version 8, 29 September 2023, CRS Reports, hal. 1

³⁵ Ilan Alon, Wenxian Zhang, Christoph Lattemann, *Op. Cit.*

³⁶ Achmad Ismail, "Sanksi Ekonomi dalam Tinjauan Politik dan Diplomasi Internasional: Resensi Buku", Indonesian Perspective, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni 2020), Semarang: Universitas Diponegoro, hal.112

negara lain dengan tujuan negara tersebut dapat menyerah pada tuntutan yang telah diatur oleh negara yang melakukan diplomasi koersif.³⁷ Dalam diplomasi koersif, kekuatan tidak digunakan sebagai bagian dari strategi militer konvensional seperti perang, melainkan digunakan sebagai komponen dari strategi politik diplomatik yang bertujuan agar lawan mundur atau tunduk kepadanya. Berbeda dengan strategi militer konvensional, ancaman dan penggunaan kekuatan dalam diplomasi koersif digabungkan dengan komunikasi dan tawar menawar yang jelas agar lawan sadar akan niat, motivasi, dan kredibilitas di setiap langkah kejadian.

Dalam pandangan Alexander George, strategi diplomasi koersif adalah instrumen kenegaraan kuno yang tidak pernah disistematisasikan. Tujuannya adalah untuk mengartikulasikan teori diplomasi koersif yang relevan dengan kebijakan, misalnya dengan diintegrasikan pada strategi negosiasi atau tawar menawar yang memberikan pemimpin pilihan politik alternatif selain perang dan strategi militer. Diplomasi koersif adalah strategi politik-diplomatik yang bertujuan untuk mempengaruhi keinginan lawannya dan membujuk agar mematuhi tuntutannya atau untuk menegosiasikan kompromi yang paling menguntungkan sekaligus meminimalisir dampak krisis dan hal negatif lainnya yang mungkin terjadi. Diplomasi koersif berbeda dengan pencegahan (*deterrence*) karena pencegahan menghalangi lawan untuk tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan, sedangkan diplomasi koersif merupakan bentuk respons terhadap tindakan yang sudah pernah dilakukan.³⁸ George menekankan bahwa diplomasi

³⁷ Alexander L. George, 1994, "*The limits of coercive diplomacy*", Colorado: Westview Press, hal. 2

³⁸ Jack S. Levy, "*Deterrence and Coercive Diplomacy: The Contributions of Alexander George*", *Political Psychology*, Vol. 29, No.4 (2008), New Jersey: Rutgers University, hal 539

koersif sangat bergantung pada konteks. Efektivitasnya bergantung pada jenis provokasi, besaran dan kedalaman konflik kepentingan, gambaran para aktor mengenai kehancuran perang, tingkat urgensi waktu, serta ada atau tidaknya sekutu di kedua pihak.³⁹

Diplomasi koersif dianggap sebagai strategi pertahanan yang berbeda dari strategi pemerasan dan strategi ofensif yang terjadi ketika ancaman digunakan dalam memaksa subjek menyerahkan sesuatu yang berharga tanpa melakukan perlawanan. Diplomasi koersif tidak memanfaatkan ancaman untuk menghalangi lawan melakukan pelanggaran terhadap kepentingan siapapun yang belum terjadi. Sebaliknya, diplomasi koersif mengarahkan untuk menghentikan sebuah tindakan yang telah dilakukan atau telah terjadi. Menurut George, negara yang menggunakan diplomasi koersif menggunakan paksaan secara lebih luas dan dapat menggabungkan ancaman hukuman dengan bujukan berupa jaminan positif dalam mempengaruhi pihak lain. Pendekatan tersebut dinamakan pendekatan *'carrot and stick'* dimana memberikan fleksibilitas strategi, bujukan, serta jaminan yang ditawarkan terpercaya.⁴⁰ Ada juga bentuk strategi diplomasi koersif lainnya yang dinamakan *'try-and-see'* yang mana setelah membuat ancaman, kemudian melihat reaksi dari lawan negara sebelum membuat ancaman tambahan. Strategi tersebut dapat dilakukan untuk menghindari tekanan dari pihak lain dan mencegah adanya krisis yang meningkat secara tajam.⁴¹ Negara yang menerapkan diplomasi koersif dapat mencapai berbagai tujuan. Cara yang paling terbatas adalah membuat musuh

³⁹ *Ibid*, hal. 544

⁴⁰ *Ibid*, hal. 10-11

⁴¹ *Ibid*, hal. 25

menghentikan tindakan yang sudah dilakukan. Yang lebih ambisius yaitu pihak lawan dipaksa tidak hanya menghentikan usahanya atau apa yang telah dilakukan lawan sebelumnya, namun juga melepaskan keuntungan yang telah diperoleh dari tindakan sebelumnya. Diplomasi koersif lebih mungkin berhasil jika negara yang melakukan diplomasi koersif memiliki kekuatan relatif yang lebih besar daripada negara yang dikenai tekanan. Selain itu, diplomasi koersif lebih mungkin berhasil jika negara yang dikenai tekanan bersedia untuk menyerah dan tunduk. Diplomasi koersif juga lebih mungkin berhasil jika mendapat dukungan internasional. Diplomasi koersif dapat menggunakan berbagai alat yaitu ancaman militer seperti ancaman serangan atau embargo senjata, ancaman ekonomi seperti ancaman tarif atau sanksi, dan ancaman politik seperti ancaman pemutusan hubungan diplomatik atau dukungan oposisi. Diplomasi koersif dapat digunakan sebagai alat yang berguna serta efektif dalam mencapai sebuah tujuan tertentu, namun terdapat pula konsekuensi negatif seperti meningkatkan ketegangan dan konflik sesama aktor negara hingga melemahkan kepercayaan dan kerja sama yang sebelumnya terjalin.⁴²

Diplomasi koersif disini digunakan oleh penulis untuk membantu menganalisa bentuk upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam mempengaruhi negara mitra. Upaya tersebut yaitu berkaitan dengan adanya diplomasi hingga bentuk ancaman yang ditujukan kepada negara lain agar tidak berbisnis dan menggunakan peralatan milik Huawei lagi.

⁴² Ibid, hal. 8

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana pengumpulan data berdasarkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberi gambaran lengkap tentang fenomena atau konflik yang dibahas dengan cara mendeskripsikan variabel dan fakta yang bersangkutan. Dengan begitu akan didapat gambaran akurat. Penelitian kualitatif data didapat dari berbagai macam sumber seperti sumber tertulis maupun lisan seperti wawancara dari pihak terpercaya. Data yang didapat bersifat induktif yang dikembangkan pola hubungannya kemudian dikelola lebih lanjut.

Metode deskriptif kualitatif yang penulis gunakan akan menjelaskan mengenai upaya yang diambil oleh Amerika Serikat untuk mempengaruhi negara mitra agar tidak berbisnis lagi dengan Huawei. Penulis juga akan menjabarkan negara mana saja yang terdampak dari adanya pengaruh Amerika Serikat.

1.6.2 Metode Analisis Data

Penulis disini menggunakan teknik analisa data berupa kualitatif, di mana kualitatif menekankan pada sisi mutu atau entitas. Penggunaan kualitatif memanfaatkan data berbentuk tulisan, cerita detail, narasi, ungkapan, maupun data dari narasumber (responden dan informan). Tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk menjelaskan fenomena secara rinci dan sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif digunakan untuk mencari tahu sebuah fenomena atau peristiwa dari seseorang, kelompok, atau bahkan instansi. Maka penulis di sini mengumpulkan berbagai informasi data yang akurat dalam mendukung penelitian kali ini untuk menjelaskan

upaya Amerika Serikat mempengaruhi negara mitra melalui sanksi terhadap Huawei.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan bersumber dari ‘Studi Literatur’ atau menggunakan data sekunder. Studi literatur dinilai cocok untuk digunakan karena didapat dari sumber-sumber penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat. Sumber studi literatur yang digunakan adalah data-data skripsi, jurnal ilmiah, berita online, artikel, buku, serta situs web resmi terpercaya. Sehingga dalam penelitian penulis ini, studi literatur dapat digunakan untuk menjelaskan upaya Amerika Serikat mempengaruhi negara mitra melalui sanksi terhadap Huawei beserta negara mana saja yang terdampak olehnya.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi

Penggunaan batasan materi ditujukan untuk memberi batasan materi yang akan dibahas agar tidak terlalu jauh dan tetap fokus pada bahasan. Oleh sebab itu sangat penting untuk digunakan penulis agar lebih mudah dalam melakukan penelitian. Penulis membatasi materi dengan menjelaskan mengenai upaya Amerika Serikat mempengaruhi negara mitra melalui sanksi terhadap Huawei beserta negara mana saja yang terdampak olehnya.

1.6.4.2 Batasan Waktu

Penelitian kali ini menggunakan batasan jangka waktu yang disesuaikan agar data yang diperoleh tidak terlalu lama. Batasan waktu yang digunakan mulai tahun 2018 hingga tahun 2023 untuk melihat hal dan bentuk upaya dari Amerika

Serikat terhadap Huawei semenjak Meng Wanzhou di tangkap paksa dan Huawei diberi sanksi.

1.7 Argumen Pokok

Realisme suatu negara memungkinkan adanya sikap untuk membela negaranya atas dasar ketidakamanan yang dirasakan. Kepentingan nasional seperti adanya ancaman keamanan, kesejahteraan ekonomi, dan pengaruh yang datang dari luar harus dibendung agar tidak merugikan di kemudian hari. Huawei sebagai perusahaan multinasional yang terdampak, dalam hal ini bersalah sehingga Amerika Serikat memberi sanksi dengan mem-*blacklist* Huawei dari negaranya. Namun adanya faktor lain terkait keamanan produknya membuat sebuah ancaman tersendiri bagi Amerika Serikat.

Amerika Serikat menganggap perusahaan Huawei sebagai ancaman keamanan nasional karena Huawei dapat disalahgunakan oleh pemerintah China sebagai alat mata-mata melalui produk dan jaringan 5G-nya. Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap Huawei karena beberapa alasan seperti hubungan perusahaan yang dekat dengan pemerintah China dan keberadaan Huawei sebagai perusahaan teknologi global yang dapat mengancam perusahaan-perusahaan milik Amerika Serikat. Dengan begitu, untuk membendung adanya pengaruh dari Huawei maka Amerika Serikat kemudian menjatuhkan sanksi terhadap Huawei sehingga tidak lagi mendapat pasokan komponen dari perusahaan di Amerika Serikat. Amerika Serikat memberi dorongan kepada negara-negara lainnya untuk tidak lagi menggunakan perangkat Huawei karena hal tersebut bisa mengancam kepentingan

nasional. Amerika Serikat juga mulai meninggalkan pengembangan jaringan milik Huawei dan berusaha untuk mengembangkan jaringan 5G sendiri agar lebih aman.

Dalam upaya mempengaruhi negara mitra, Amerika Serikat memiliki beberapa cara seperti diplomasi antar negara, mengancam negara, berkolaborasi dengan negara lainnya, hingga berkampanye. Negara yang menjadi sasaran Amerika Serikat seperti negara-negara yang tergabung dalam organisasi yang sama seperti Intelijen Five Eyes serta negara lainnya seperti Jerman, Spanyol, Kanada dan lainnya.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah menulis, maka penulis akan membagi struktur skripsi ini ke dalam 4 bab, antara lain:

BAB I	PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Konseptual 1.5.1 Realisme 1.5.2 Diplomasi Koersif 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Tipe Penelitian 1.6.2 Metode Analisa Data 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan
BAB II	HUAWEI DIANTARA ISU ANCAMAN KEAMANAN DAN DAFTAR HITAM AMERIKA SERIKAT 2.1 Isu Penggelapan Dana, Perdagangan Gelap dengan Iran dan Campur Tangan Pemerintah China pada Bisnis Huawei 2.2 <i>Blacklist</i> Pemerintah Amerika Serikat
BAB III	PENGARUH AMERIKA SERIKAT DALAM MEM-BLACKLIST HUAWEI DI NEGARA MITRA

	3.1 Bentuk Tekanan Amerika Serikat dalam Mempengaruhi Negara Mitra 3.2 Negara yang diberi Pengaruh oleh Amerika Serikat
BAB IV	PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran

